

Peranan dan Implementasi Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur

Kristina Yuniari Holo¹, Khasanah², Waskito³,

Universitas Ivet

Abstract

The Role and Implementation of the Tourism Development Strategy of West Sumba Regency East Nusa Tenggara. Indonesian Journal of Geography Education .

Tourism has become one of the main drivers of the global economy with a very fast rate of development. The development of tourism as an industry that prioritizes services and services shows a very promising role for the economic growth of a country. This fact is probably caused by the great interest of the world community who began to view that traveling is a necessity. It is conceivable with such a large world population and if 30% agree to view tourism as a necessity of life, how rich are the countries that make this service sector a source of income.

The objectives of this study are (1) to determine the role of the Department of Culture and Tourism in Tourism Development in Southwest Sumba Regency, NTT Province. (2) To find out the implementation of the Tourism Development Strategy carried out by the Culture and Tourism Office of Southwest Sumba Regency, NTT Province.

This research is a descriptive qualitative research in the form of written words from people and observed behavior. The data was obtained by conducting interviews with related parties so that the results of the study were obtained. The data analysis used is data condensation (data condensation), presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification).

The results showed that the role of the Tourism Office in increasing the number of visitors. The Tourism Office carried out various promotions through online media, events, exhibitions, banners and brochures. Increasing motivation by providing training to the community. The Tourism Office empowers the community around the island by providing direction and socialization in making souvenirs.

Keywords:

Tourism Development; Management; Southwest Sumba

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi kekayaan alam yang merupakan modal dasar bagi dunia kepariwisataan yang dapat menjadikan sebagai tempat objek wisata yang patut untuk dibanggakan terlebih objek wisata pantai dan lautnya, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai garis pantai yang panjang. Potensi

kekayaan alam apabila dikelola atau manajemen dengan baik akan memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah. Banyak negara di dunia yang memiliki organisasi kepariwisataan yang di danai oleh pemerintah untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataannya secara internasional.

Tujuan pengelolaan potensi objek wisata menurut Ricardson dan Fluker (dalam Aditya, 2010:2) yang diluncurkan tahun 1995 oleh The Pacific Asian Travel Association (PATA) adalah:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi nasional Negara Indonesia
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan
4. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Tabel 1.1 Daya Tarik Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Wisata Rtenggaro	Desa Adat Ratenggaro
2.	Wisata Pantai Bawana	Desa Kahale, Kodi Balaghar
3.	Wisata Danau Wekuri	Desa Karoso, Kodi utara
4.	Wisata Pantai Pero	Desa Pero Konda, Kodi Utara
5.	Wisata Rumah Budaya Sumba	Jl Rumah Budaya, Weetabula
6.	Wisata Mananga Aba	Desa Karuni, Loura

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya cukup beragam baik secara potensi budaya maupun potensi alam. Permasalahan utamanya adalah

h masih minimnya wisatawan yang datang berkunjung ke kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berbagai potensi pariwisata dengan segala fasilitas pendukungnya memerlukan upaya dan usaha dari berbagai pihak terutama instansi atau lembaga pemerintah dan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan, sehingga segala program dan kegiatan antar sektor tersebut dapat terpadu dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui perkembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berikut merupakan hasil rekapitulasi kunjungan wisatawan ke Sumba Barat Daya dari tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sumba Barat Daya

2015	2016	2017	2018	2019
1.200	1.934	2.445	3.777	4.553

Sumber: Disbudpar Kabupaten Sumba
Sumba Barat Daya 2015

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat di lihat jumlah kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Sumba Barat Daya masih relatif sedikit. Terdapat penambahan angka tetapi tidak signifikan. Bahkan wisatawan yang datang ke Sumba Barat Daya belum dikelola secara baik, sehingga masih sulit untuk dideteksi dan diakses datanya baik yang melakukan kunjungan langsung dan kunjungan ketitik destinasi wisata lainnya. Salah satu hal yang harus di pertimbangkan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengembangkan kepariwisataan. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan kepariwisataan. Peran pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Sumba Barat Daya jelas sangat urgent karena menentukan arah pembangunan kepariwisataan bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumba Barat Daya dan stakeholders terkait. Tumbuh kembangnya kepariwisataan di Kabupaten Sumba Barat Daya akan sangat menentukan bahwa

Penciri dapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul "Peran Dan Implementasi Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur".

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian dilakukan oleh Andryano Febrian Bambar (2015) dalam skripsi Program Studi

S1 Destinasi Pariwisata berjudul "Perencanaan Fasilitas Pariwisata di Kampung Wae Rebo Desa Satarlenda, Kabupaten Manggarai Tengah, Nusa Tenggara Timur". Dari hasil penelitian menunjukkan pola kunjungan wisatawan dan perencanaan fasilitas pariwisata di Wae Rebo Desa Satar Lenda Kabupaten Manggarai Tengah Provinsi NTT. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada lokus penelitian, di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun berbeda kabupaten.

Perbedaan utama adalah fokus penelitian yaitu tentang kampung tradisional dan perencanaan peneliti yang dilakukan ada laberfokus kepada Peran dan Implementasi Pengembangan Pariwisata oleh

Disbudpar Kabupaten Sumba Barat Daya,
Provinsi NTT.

PARIWISATA

Pariwisata memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari 3 unsur yaitu (Wahab dalam Yoeti, 1992):

- a. Man artinya orang yang melakukan perjalanan wisata
- b. Space artinya daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan
- c. Time artinya waktu yang di gunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Berdasarkan 3 unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa saja yang dialami dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Yoeti,1992). Tinjauan tentang konsep pariwisata relevan digunakan dalam penelitian ini sebagai pembatas dan penbahwa penelitian ini bukan masuk ke dalam ranah ilmu pemerintahan atau ilmu politik melainkan melihat fenomena peran dan implementasi strategi pengembangan

yang dilaksanakan oleh Disbudpar Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT dari perspektif ilmu pariwisata.

PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah perubahan yang terencana oleh suatu badan atau organisasi sosial Sebagai sebuah proses pembangunan meliputi banyak aspek seperti kajian akademis, penganggaran kapasitas, kapabilitas, politik, sosial, budayadan hukum. Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai suatu target yang sebelumnya

tidak atau tercapai. Sehingga pembanguan terwujud diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan esensi dan sasaran pembangunan tersebut terutama masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam penelitian ini konsep pembangunan difokuskan kepada sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT. Bagaiman

a Disbudpar Kabupaten Sumba Barat Daya,

Provinsi NTT mewujudkan pembangunan kepariwisataan akan dapat dilihat dengan aplikasi dari konsep pembangunan tersebut

STRATEGI

Strategi dalam penelitian adalah cara atau upaya mewujudkan program kerja berkaitan dengan kemampuan, kelemahan, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan anggaran pendanaan di SKPD Disbudpar

Kabupaten Sumba Barat Daya.

Secara umum segala kegiatan mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dan strategi sangat menentukan Disbudpar Kabupaten Sumba Barat Daya.

PENGEMBANGAN PARIWISATA

Menurut Sammeng (2001), Pengembangan adalah suatu bentuk evolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya bermakna "tidak jalan ditempat". Pengembangan dikaitkan dengan dua hal yakni proses dan tingkat perkembangan sesuatu. Menurut Pearce dalam Sammeng (2001), lima konteks dan konotasi istilah pengembangan yaitu:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Modernisasi
- c. Pemerataan keadilan
- d. Transformasi sosio ekonomi

Pengorganisasian kembali tata ruang Pengembangan kepariwisataan diIndonesia mencakup multidimensi yaitu ekonomi, social budaya, politik, dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan wisata merupakan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan menurut Pendit (2006).

Supaya pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan secara harmonis, dan disarankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut (Manuaba, 1999)

- a. Harus ada proses perencanaan dan partisipasi masyarakat
- b. Harus ada kepastian, adanya keseimbangan, adanya sasaran ekonomi, social budaya dan masyarakat
- c. Hubungan antara pariwisata, lingkungan dan budaya harus dikelola sedemikian rupa sehingga lingkungan lestari untuk jangka panjang
- d. Aktivitas pariwisata tidak boleh merusak sumber daya alam
- e. Perkembangan pariwisata tidak boleh terlalu cepat, diawali dari skala kecil atau sedang
- f. Lokasi pengembangan harus ada keharmonisan antara kebutuhan wisatawan, tempat dan masyarakat setempat
- h. Keberhasilan dari pada aktivitas tergantung pada keharmonisan antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola industry pariwisata
- i. Pendidikan yang mengarah kepada pengertian sosio-kultural pada setiap tingkat masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata termasuk juga perilaku wisatawan harus secara serius diorganisasikan.

- j. Peraturan Perundang-undangan yang secara pasti melindungi budaya harus dikeluarkan dan dilaksanakan sekaligus merevitalisasikan
- k. Investor dan wisatawan harus bisa menghormati kebiasaan norma dan nilai setempat, sedangkan hal-hal yang menimbulkan dampak negative dihindari dan dampak positif dimanfaatkan.

Beberapa konsep pengembangan di atas dalam penelitian ini akan diaplikasikan untuk dapat melihat implementasi strategi pengembangan pariwisata, sehingga secara alamiah akan terlihat substansi apa dari strategi pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sulit diimplementasikan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan strategi pengembangan pariwisata kedepan.

PENGELOLAAN OBJEK WISATA

Arti dari kata pengelolaan oleh beberapa orang sering disamakan dengan arti manajemen, dimana tujuan dari manajemen dan pengelolaan adalah sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal untuk mencapai

berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi (Muniarti, 2014).

Pengelolaan objek wisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan objek wisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan Hall (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata). Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutan interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitas sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena analisis data ada penelitian kualitatif menghasilkan data yang deskriptif maka peneliti ingin mengetahui Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

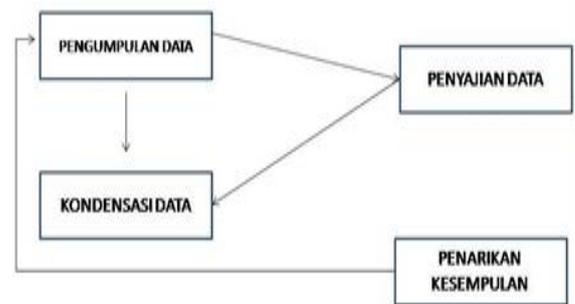
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan /melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, factual dan akurat (Kusumayadi dan Sugiarto, Endar:2000).

Dalam *penelitian* ini Subjek merupakan orang yang dianggap mampu memberikan informasi maupun data data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi maupun data dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik penentuan Subjek penelitian ini dipilih menggunakan Purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria Subjek yang diperlukan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Sebagai teknik keabsahan data untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan semua subjek dan informan penelitian.

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah:

kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*) (dikutip dari jurnal Andimisa, 2015).



PEMBAHASAN

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu Kabupaten dari 4 Kabupaten yang ada di pulau Sumba dan 22 Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 129 desa dan 2 kelurahan . Kecamatan- kecamatan dimaksud adalah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Wewewa Utara, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Tengah, Loura dan Kota Tambolaka.

Secara geografis Kabupaten Sumba Barat Daya terletak dibagian ujung barat Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan koordinat 9^o,18'-10^o, 20' LS (Lintang Selatan) dan 118^o,55'-120^o,23' BT (Bujur Timur). Secara geografis tepat berada diantara 9^o,18'01" Lintang Selatan dan 180^o55'-120^o 23 Bujur Timur.

Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Motivator

Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Motivator dalam pengelolaan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator yang mendorong masyarakat

untuk bergerak mengelola dan mengembankan potensi Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai objek wisata Sumba Barat Daya yang potensial. Motivasi dirasa perlu karena masyarakat harus didorong supaya lebih mengerti kemana arah pembangunan dan pengelolaan objek wisata alam tersebut. diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik .Berikut Hasil wawancara penulis dengan informan Mengenai Peran Dinas Pariwisata sebagai motivator yaitu:

“dinas pariwisata atau pemerintah berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam, dan juga mengembangkan kesadaran anggota masyarakat terhadap kendala maupun permasalahan yang dihadapi”. (hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk bergerak mengelola dan mengembangkan potensi Kabupaten Sumba Barat Daya yang ada perlu

adanya dorongan dan motivasi dari pihak pemerintah agar masyarakat sadar akan perkembangan pariwisata sehingga dapat berjalan dengan baik.

Dinas Pariwisata sebagai motivator melakukan pengelolaan pariwisata, pengelolaan pariwisata merupakan salah satu program kerja yang dilakukan oleh seksi promosi dan pemasaran produk dalam bidang pembinaan dan pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak pemerintah beserta masyarakat terhadap wisatawan Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata, karena sejatinya dalam bidang pariwisata yang ditawarkan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan bagi wisatawan, sehingga wisatawan merasa ingin kembali untuk berwisata ke destinasi wisata tersebut. Adapun hasil wawancara dengan salah satu pengunjung yaitu:

“Layanan informasi pun cukup baik dan perlu juga ditingkatkan kembali, Pengelola harus memperhatikan kebersihan di setiap wisata yang ada di NTT terlebih khusus pulau sumba supaya menjadi wisata favorit untuk semuanya”

Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan di seluruh objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan secara bertahap, karena sebagai peran

Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan pariwisata untuk memberikan citra positif bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan pariwisata agar kinerjanya, menghasilkan kebaikan terhadap penilaian pemerintah pusat, agar dinilai Dinas Pariwisata sudah menjalankan peran dengan hasil baik.

Masyarakat merupakan pelaku pengelolaan pariwisata yang memiliki peranan yang sangat sentral, karena masyarakat juga sebagai tuan rumah secara umum bersentuhan langsung dengan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti memberikan pelayanan jasa maupun menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya tidak akan berdiri sendiri mengelolah pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, tanpa kerja sama aparat pemegang kekuasaan yang ada yaitu masyarakat dan pihak pemerintah. Dinas Pariwisata sudah berusaha melakukan pengelolaan pariwisata dengan baik. Dinas Pariwisata merupakan salah satu dinas yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan peran yang disandangnya sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangkep. Sesuai

dengan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki peranan yang sangat besar terutama dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dinas Pariwisata berkewajiban melakukan pengelolaan pariwisata, dengan mengelola aset seni budaya daerah, nilai tradisi, situs sejarah dan purbakala. Dinas Pariwisata mengenalkan potensi daerah / objek dan daya tarik wisata Kabupaten Sumba Barat Daya keluar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri dengan strategi yang dilakukannya, sebagai motivator itu harus melakukan pengelolaan pariwisata. Meningkatkan daya tarik objek wisata atau pengelolaan pariwisata yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain termasuk kelestarian sumber daya alam dan ekonomi rakyat disekitar daerah wisata.

2. Fasilitator

Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Fasilitator adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pengelola berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam menghadapi inovasi. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan atau menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata. Dinas Pariwisata melanjutkan perannya yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Dalam konteks ini, dinas pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Kabupaten Sumba Barat Daya.

a) Menyediakan sarana dan prasarana

Menyediakan alat maupun bangunan yang membuat pengunjung betah di pulau

tersebut yaitu dengan menyediakan musholla, toilet, villa, gazebo dan berbagai fasilitas lainnya. Pada prakteknya ketersediaan toilet, musholla dan fasilitas umum lainnya masih kurang, kebersihan toilet dan fasilitas umum kurang.

b) Memfasilitasi Aktivitas Masyarakat

Memenuhi kebutuhan yang diinginkan pengunjung agar ingin datang lagi ke pulau tersebut, seperti menyediakan kamar mandi, air bersih dan listrik. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan atau menyediakan fasilitas dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata. Dinas Pariwisata melanjutkan perannya yang kedua yaitu sebagai fasilitator. Dalam konteks ini, dinas pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang penggunaan teknis, strategi, dan pelaksanaan dalam program yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan obyek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya masih memerlukan fasilitas yang dapat menunjang pengembangan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya misalnya meningkatkan air bersih dan aliran listriknya karena yang jadi tempat istirahat

yang utama bagi pengunjung aliran listriknya masih kurang memadai.

Berikut Hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya mengungkapkan bahwa:

“masyarakat disini maupun pengunjung yang datang masih sangat memerlukan fasilitas yang memadai seperti halnya dengan pengadaan aliran listrik, air bersih karena fasilitas aliran listrik dan air bersih masih kurang memadai padahal ada sebagian pengunjung atau wisatawan yang datang ingin menginap di villa adalah tempat para pengunjung untuk beristirahat, saya ingat pernah ada rombongan mahasiswi mereka mengeluh banyak fasilitas yang tidak bisa dioperasikan atau digunakan walaupun mereka terkesima dengan pemandangan laut dan pasir putih yang ada namun kurang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat di luar sana masih banyak yang belum mengetahui tempat ini masyarakat berharap ada bantuan dari pihak pemerintah terkait pengembangan obyek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya”

Adapun sarana dan prasarana dalam bidang pariwisata yang telah disediakan oleh pihak pemerintah adalah alat selam, banana boat, snorkling, waterpark, villa, meeting room, dan musollah. Selain itu

informan juga mengungkapkan bahwa salah satu yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan event. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah salah satunya menyediakan sarana dan prasarana dalam hal pengadaan event, dimana event ini merupakan salah satu cara efektif dalam mempromosikan daerah dan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang akhirnya mensejahterakan masyarakat”

Fasilitator dinas adalah upaya dinas dari awal, tentunya itu dalam memfasilitasi masyarakat dari setiap kecamatan untuk bisa mengelola di wilayahnya masing-masing dengan mengangkat potensi apa yang ada dengan membentuk organisasi atau tim dibawah pengawasan Dinas Pariwisata, intinya agar masyarakat sekitar Kabupaten Sumba Barat Daya sadar wisata, dan bisa hidup sejahtera dengan potensi wisata yang sangat luar biasa, di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi masyarakat juga berperan dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam menjalankan perannya di bidang pariwisata dan budaya, dinas Pariwisata

Kabupaten Sumba Barat Daya memfasilitasi wisatawan yang ingin mendapatkan informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya melalui fasilitas pemandu wisata. Sebagai mana yang di sampaikan salah satu informan AA yang tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata memfasilitasi kapal dan juga pemandu untuk para wisatawan mancanegara sebagai akses menuju Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun untuk wisatawan lokal dapat menggunakan perahu/kapal yang dimiliki masyarakat setempat”(hasil wawancara dengan seksi fasilitas hak kekayaan dan regulasi).

Dalam hal pengelolaan pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Memfasilitasi masyarakat demi mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat dan memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kegiatan kepariwisataan. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya bekerjasama dengan pihak masyarakat. Pihak masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata adalah pemilik perahu dan pemilik rumah makan.

Berbeda halnya dengan informan salah satu pengunjung objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya mengatakan bahwa fasilitas diberikan atau yang disiapkan oleh pemerintah belum maksimal, hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut:

“fasilitas dari pemerintah itu belum maksimal, saya atau mungkin kami para pengunjung merasa kurang puas dengan fasilitas yang ada sebab fasilitas yang ada sudah banyak yang rusak dan ada juga yang tidak layak pakai, listrik yang terbatas dan juga air bersih sangat terbatas jadi ya merasa kurang puas saja.”

Aspirasi dari masyarakat menjadi masukan berarti bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai suatu masukan yang dapat dijadikan pertimbangan kebijakan dalam upaya membenahi Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebaliknya, tindakan dinas pariwisata juga memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dalam melestarikan objek wisata dan kekayaan budaya yang ada.

3. Dinamisator

Dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata

memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai dinamisator yaitu:

- a. Memberikan Bimbingan dan Pengarahan Memberikan petunjuk atau pedoman kepada masyarakat sekitar pulau untuk menggunakan kapa serta keahlian mereka untuk mendapatkan penghasilan dari pengunjung.
- b. Memberikan Pelatihan Kegiatan yang mengarahkan masyarakat sekitar Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengasah keahlian mereka dalam pembuatan souvenir atau oleh-oleh khas dari pulau

tersebut untuk diperjual belikan pada pengunjung. Sehingga ketiga peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya saling berkesinambungan dalam peningkatan jumlah pengunjung objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan yang menyatakan bahwa: “sementara ini pemerintah telah membuat perda tentang pariwisata, tetapi belum disahkan oleh DPR dan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh dinas pariwisata yaitu memberikan pemberdayaan atau pelatihan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Sumba Barat Daya dalam membuat kerajinan tangan atau oleh-oleh beserta souvenir yang dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar”

Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan pariwisata dengan pihak masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, karena sudah dipastikan Dinas tidak bisa berjalan sendiri dan bekerja sendiri untuk mengelola pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya tanpa campur tangan pemegang kekuasaan yang ada yaitu pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pariwisata bersifat sistemik dan pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara terpisah, sehingga mau tidak mau

memang harus ada sinergitas antar stakeholder yang ada. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“saya sudah dua kali berkunjung di Kabupaten Sumba Barat Daya ini, kunjungan pertama saya pada tahun 2014 dimana Kabupaten Sumba Barat Daya ini masih dalam proses pembangunan sehingga beberapa sarana dan prasarana disini belum memadai dan belum banyak pedagang dan kunjungan sayayang kedua yaitu hari ini dimana menurut saya sarana dan prasarana sudah lumayan banyak yaitu telah disediakan tempat sampah, mushola, villa untuk menginap, dan lain sebagainya tetapi masih ada satu yang sangat dibutuhkan pengunjung yaitu air tawar yang digunakan untuk mandi sehabis berenang dan itu belum disediakan oleh pemda, jadi saya sebagai pengunjung menyarakan kepada pemda agar tahun ini dapat menyediakan air tawar untuk pengunjung untk meningkatkan jumlah pengunjung.”

Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka menjalankan peran dinamisator adalah melakukan monitoring wisata terutama masyarakat. Selain melakukan monitoring terhadap usaha jasa pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Pariwisata juga melakukan usaha atau pendekatan Bauran

destinasi, Pendekatan Manajemen Strategik, Pendekatan Perencanaan terpadu dan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena banyak ditemukan pihak masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga dengan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pendekatan terhadap pihak masyarakat tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Sebagai upaya Dinas Pariwisata dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik pihak pemerintah lainnya maupun masyarakat.

“kami dari pihak dinas pariwisata saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan objek wisata agar wisatawan tertarik untuk berkunjung, kamipun masih banyak kendala seperti kurangnya personil, serta di Kabupaten Sumba Barat Daya masih terbatas listriknya dan juga air tawar . Memang masih ada kendala akan tetapi kami akan membenahi saat ini kami merencanakan untuk bekerja sama dengan pihak PLN dan juga pihak PDAM untuk penyediaan listrik dan air

tawar” (hasil wawancara dengan seksi pengembangan SDM pariwisata budaya & ekonomi kreatif).

Pihak-pihak pemerintah dan masyarakat dalam perkembangan pariwisata sangat berperan penting, yang membantu perkembangan pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan pariwisata dengan pihak masyarakat dalam perkembangan pariwisata itu harus dilakukan. Agar masyarakat yang beralamat di daerah wisata berkewajiban mengangkat pariwisata di daerahnya dan diramaikan dari adanya pihak asing. Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan pariwisata dengan prinsip dan pedoman yang digunakan berdasar pada kerakyatan. Yaitu sejauh mana pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat yang mendukung dari partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa

menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator).

Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari	477
2	Februari	388
3	Maret	385
4	April	4
5	Mei	4
6	Juni	102
7	Juli	228
8	Agustus	309
9	September	156
10	Oktober	411
11	November	445
12	Desember	688
2020		3587
2019		8679
2018		8214

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengelolaan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya telah dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2020 dengan menggunakan APBD. Pengelolaan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya telah melibatkan masyarakat sekitar.
2. Pengelolaan objek wisata Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya belum optimal dan belum berjalan dengan baik. Karena banyaknya objek wisata yang kurang diperhatikan sehingga semuanya terbengkalai sarana dan prasarana yang ada sudah banyak yang rusak karena tidak adanya perawatan, tenaga pengawas dan petugas kebersihan hanya satu orang hal tersebut yang menyebabkan kurang minat wisatawan untuk berkunjung atau wisata yang pernah berkunjung tidak berminat datang kembali ke Kabupaten Sumba Barat Daya karena tidak dirawat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachmat, I dan E Maryani. (1997 dan 1998). Geografi Pariwisata. Jurusan Alfabeta
- Arifin, Anwar.1984. Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Bandung:ARMIC
- Bambar, Andryano Febrian. (2015). Perencanaan Fasilitas Pariwisata. Grafindo Persada
- Husein Umar. (2005), Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis, Jakarta
- JohnM. Bryden. (1973). "Tourism and Development. xv Newyork: Cambridge Kampung Wae Rebo Desa SatarInda Kabupaten Manggarai Tengah Nusa Tenggara Timur
- Kartasapoetra, G. (1994). Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur". Jurnal Administrasi Negara, vol.3,No. 2,2015:521-533)
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2014). Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Misna, Andi., "Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Moleong, Lexy J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung RemajaMuhadam Labolo. (2006). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta; PT. Raja Muhammadiyah Malang Press
- Muslimin. (2016). Metode Bidang Penelitian Sosial. Telkom: Universitas Paramita, cetakan kedelapan (edisi revisi) Jakarta.
- Pendidikan Geografi FPIPS IKIP Bandung
- Pendit, S. (2006). Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. PT. Pradnya Persada,
- Pitana, I Gede dan Putu Gede Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata.Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Purwanto, Iwan. (2012). Pengembangan Strategi. Bandung: Yrama Widya Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Rosdakarya
- Ryaas Rasyid. (2000). Makna Pemerintahan. PT. Mutiara Sumber Daya Widya,. Jakarta.

- Sammeng, Andi Mappi. (2001). Cakrawala Pariwisata. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sanderson, Stepen K. (1993). Sosiologi Makna: Sebuah Pendekatan Terhadap Soekanto, Soerjono. (1993). Kamus Sosiologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung
- Sukristono. (1995). Strategic management in action. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama
- Tenggara Timur”. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Toda. (2016). Arah Pembangunan Nusa Tenggara Timur Sebagai Provinsi Pariwisata Berkelas Dunia” Jurnal Penelitian.
- Yoeti. AOKA. (1992). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa Offset
- Sumba Barat Daya.2021. Kabupaten Sumba Barat Daya. <http://sbdkab.go.id> (diakses pada 17 Mei 2021)

Conclusions should answer the objectives of research. Tells how your work advances the

field from the present state of knowledge. Without clear Conclusions, reviewers and readers will find it difficult to judge the work, and whether or not it merits publication in the proceeding.